



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 153-02-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 230-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN BALI**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

JUMAT, 12 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 153-02-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 230-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah dan Bali

PEMOHON

1. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrat (Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Berkarya (Perkara Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 153-02-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Berkarya (Perkara Nomor 230-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Jumat, 12 Juli 2019, Pukul 13.29 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Aqmarina Rasika**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahmad Suherman
2. Irwan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Natalia Sahetapy
2. Victorius Tonci Tibo

C. Pemohon Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Adie Seth Jinu

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Pua Hardinata
2. Akhmadsyah Giffary

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153-02-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dahlan Pido
2. I Made Arnawa
3. I Made Kariadi

F. Termohon:

1. Sapta Tjipta
2. Sastriadi
3. I Dewa Agung Gede Lindartawan
4. Anak Agung Gede Raka Nakula

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, dan 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ali Nurdin
2. Hendri Sita Ambar Kumalawati

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sutejo

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ibnu Shina Zaenudin
2. Elly Sunarya

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172-04-21 DAN 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rony Eli Hutahaeen
2. Nengah Sudiarta

K. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Satriadi
3. Edi Winarno
4. Rudyanti D. Tobing
5. Ketut Aryani
6. Dewa Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
7. I Wayan Wirka
8. Bella O.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmannirahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sidang untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, Perkara Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, Perkara Nomor seras ... 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Perkara Nomor 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 memperkenalkan, siapa yang hadir pada sidang ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ka ... saya ... kami dari Kuasa Hukum Partai Golkar yang diwakili oleh saya sendiri, Ahmad Suherman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera. Kami dari Partai Demokrat untuk Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Izin perkenalkan diri, nama saya Natalia Sahetapy bersama rekan saya Kuasa Tambahan ... membawa Kuasa Tambahannya bernama Victorius Tonci Tibo. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya Perkara Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, ya? Belum hadir? Partai Berkarya belum hadir.

Berikutnya par ... Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari perseorangan dan sekaligus juga bahwa keterkaitannya dengan partai. Jadi kami mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), melalui saya sebagai juru bicara, Pua Hardinata, S.H., serta di belakang saya, rekan saya, beserta juga dengan Prinsipal, H. Adie Seth Jinu. Jadi kami (...)

7. KETUA: ASWANTO

Coba, Pak, untuk memperkenalkan diri saja dulu. Nanti Bapak diberi kesempatan untuk mempresentasikan.

Baik, selanjutnya untuk Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Gerindra, saya sendiri Dahlan Pido, S.H., M.H., terus teman ... rekan kami, I Made Arnawa, S.H., dan I Made Kariadi, S.E., S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Perkara Nomor 230/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya! Juga belum hadir.

Sekarang KPU silakan! Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Assalamualaikum wr. wb. Dari Termohon (KPU), hadir dari KPU Kalimantan Tengah, Pak Sapta Tjipta dan Pak Satriadi. Kemudian dari KPU Bali, hadir Pak I Dewa Gede ... I Dewa Agung Gede Lindartawan dan Pak A. Gede Raka Nakula. Sedangkan kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, saya Ali Nurdin bersama Ibu Hendri Sita untuk Perkara Nomor 170[Sic!]-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb. Dari kantor hukum yang lain?

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN

Masih ada. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan, sebagai Kuasa Hukum Termohon (KPU RI), nama saya Ibnu Shina, bersama rekan saya, Elly Sunarya, untuk mewakili Provinsi Bali, untuk Partai Gerindra.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Bawaslu!

16. BAWASLU: RAHMAT BAGJA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir di sini Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja. Didampingi oleh Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Bapak Satriadi. Anggota, Bapak Edi Winarno dan Ibu Rudyanti. Kemudian ketua dan Bawaslu ... Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketua, Ibu Ketut Aryani, bersama dengan Pak Dewa, dan Pak Wayan Wirka. Terima kasih, Yang mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Pihak Terkait! Disampaikan Pihak Terkait untuk nomor perkara berapa?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21 DAN 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya sebagai Pemohon dan Gerindra, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Rony Eli Hutahaean dan yang di samping saya adalah Nengah Sudiarta, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang datang ini, dari mana ini? Ya? Termohon? Satu tim ... Timnya Pak Nurdin juga ini, ya? Bukan? Silakan perkenalkan diri yang baru datang!

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon maaf keterlambatan. Saya Sutejo dari kantor Nurhadi Sigit Law Office, Kuasa Hukum KPU, Pak. Khusus untuk Demokrat. Terima kasih, Pak.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Sebelum kita mulai pemeriksaan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama bahwa perkara ini sudah dilakukan gelar perkara. Panel sudah memeriksa, sudah melakukan gelar perkara. Oleh sebab itu, Para Pemohon diminta untuk menyampaikan garis-garis besarnya saja, pokok-pokoknya saja. Nanti waktunya juga tidak lama, 10 menit, sesuai dengan pemeriksaan perkara-perkara sebelumnya, juga 10 menit waktunya. Itu yang pertama.

Yang kedua, Mahkamah sudah mengumumkan ketika itu bahwa batas akhir perbaikan adalah tanggal 31 Mei. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa permohonan yang dipresentasikan atau yang dibacakan adalah permohonan yang tidak lewat tenggat waktu, yaitu tidak lewat dari 31 Mei.

Itu yang perlu kami informasikan lebih awal dan untuk memandu sidang, dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Aswanto.

Ini agak sepi kita ini karena masih ada 2 lagi barangkali yang kita harapkan datang. Mudah-mudahan datang di akhir daripada pemeriksaan ini, supaya waktu kita bisa nanti selesaikan sesuai dengan jadwal. Tapi kalau tidak, nanti bisa lebih cepat. "Jadi ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus." Begitu, ya.

Tadi sudah ditegaskan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel. Bahwa yang kita pedomani dalam pemeriksaan ini adalah permohonan yang terakhir di tanggal 31 Mei itu. Jadi, jangan nanti ada persoalan lagi, ada penambahan, yaitu peru ... diba ... yang dibacakan adalah permohonan perubahan setelah tanggal 31. Itu nanti menjadi tidak perlu kita tanggapi lagi.

Untuk pertama sekali, ini dari Partai Golkar, ya? Tadi juru bicaranya Ahmad Suherman. Langsung bisa menyampaikan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi ke pokok-pokoknya saja, ya!

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dipersilakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Partai Golkar dalam Perkara 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, selaku Pemohon. Pada

prinsipnya, kami di sini untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kapuas, Daerah Pemilihan I. Prinsipnya kita di sini mempersoalkan penyelenggaraan pada saat pemilihan di tanggal 7 April, yang mana kita mendapatkan pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, itu terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda, dan yang tidak hadir pada saat pemilihan, namun terdapat dalam daftar hadir pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C-7 DPT KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, orang-orang tersebut dinyatakan hadir, terdapat tanda tangan di situ, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Jadi, dianggap mereka-mereka yang seharusnya tidak memilih, jadinya diduga menggunakan surat suara, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Yang semestinya tidak hadir, ada yang hadir (...)

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang meninggal tadi, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ada yang meninggal (...)

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, itu di TPS berapa itu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Di TPS 36 (...)

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya 1 TPS, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Hanya 1 TPS, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan lanjut!

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, selanjutnya kami juga menduga bahwa proses yang terjadi di sana ada indikasi, penyelenggara itu bekerja sama dengan salah satu caleg partai politik di sana, yang memperoleh suara yang cukup signifikan dari Partai Demokrat, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, partai di sini yang sudah tertulis Demokrat, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Dengan Nomor Urut 4.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Hal demikian juga kami sudah sampaikan pada saat proses di tingkat PPK. Karena persoalan ini mulai diketahui di PPK, itu kami sudah ... saksi dari Partai Golkar itu protes, Yang Mulia. Akan tetapi, pada saat

proses ... protes di sana, mencoba untuk meminta Form D-4 kalau enggak salah ... DA-1 kalau enggak salah untuk ... kalau saya tidak keliru (...)

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Itu untuk keberatan, ternyata tidak diberikan. Kami ada bukti video di sana, pada saat proses itu, nanti akan kita tambahkan buktinya, Yang Mulia. Bahwa terjadi protes di sana, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kembali ke ini ... tabel ini, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagaimana perolehan daripada (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Begini (...)

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Golkar.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Begini, Yang Mulia, proses tabel ini ... ini penetapan Termohon, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Termohon menetapkan Golkar itu memperoleh 7.092 (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

92.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Padahal, menurut Pemohon sebetulnya hanya 7.063 (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ini kam (...)

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Bukan. Di sini, Yang Mulia, setelah kami menganggap pada TPS 36 itu tidak ... tidak terselenggara, Yang Mulia, karena proses yang demikian tadi, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

He eh. Tapi kami tidak mintakan di Petikum yang itu, Yang Mulia. Prinsipnya kami di Petikum (...)

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Na ... ya, nanti Petikum. Nanti lagi ... masalah Petikum nanti. Ini dahulu!

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Siap.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang penting menurut Pemohon, Golongan Karya itu sebenarnya di sini ke ... suaranya melebihi 37, itu yang mestinya saya tanya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Itu perhitungan kami, Yang Mulia. Karena kami menganggap di TPS 36 itu prosesnya tidak benar, sehingga kami menganggap itu tidak ada di sana, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, lanjut!

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Mungkin (...)

66. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Kalau Anda menganggap itu tidak ada, darimana angka 709[Sic!] dan angka 7.063 itu?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Dari hasil perolehan di sana, Yang Mulia. Perolehan suara Partai Golkar dan suara Partai Demokrat.

68. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi kan Anda menganggap tadi tidak ada, gitu.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

70. KETUA: ASWANTO

Berarti ada di sana angka itu? Apa (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ini kan 792[Sic!] ini ... itu termasuk dari ... hasil dari TPS 36 itu. 792 ... 7.092 yang ditetapkan oleh Termohon (...)

72. KETUA: ASWANTO

Tapi (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Demikian juga dengan Demokrat, itu termasuk perolehan suara Demokrat yang ada di TPS (...)

74. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! 7.092 ini (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

92.

76. KETUA: ASWANTO

Itu rekap di tingkat (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Sudah tingkat (...)

78. KETUA: ASWANTO

Kecamatan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Bukan, Yang Mulia (...)

80. KETUA: ASWANTO

Kabupaten?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, sudah kabupaten (...)

82. KETUA: ASWANTO

Kabupaten, oh. Sehingga menurut Anda, mustinya suara Pemohon ini tidak 79 ... tidak 7.092, tetapi 7.063?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Begini, Yang Mulia. Kami masukkan ini, Yang Mulia, kami tidak ... sebenarnya tidak mempermasalahkan sengketa hasil angka-angka seperti ini sebenarnya, Yang Mulia. Kami hanya memasukan di sini, unt ... bahwa di TPS 36 itu karena terjadi persoalan bagi kami, menurut kami, akhirnya kami kali 0 di sana, Yang Mulia, hasilnya.

84. KETUA: ASWANTO

Oke, jadi menurut Anda, angka ini enggak ada, gitu? Karena (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Di (...)

86. KETUA: ASWANTO

Ada kecurangan di TPS itu?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: ASWANTO

Oke.

89. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan lanjut!

90. KETUA: ASWANTO

Silakan!

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Tadi, Yang Mulia, bahwa selain daripada itu, Pemohon juga telah melakukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model DB-2 KPU tertanggal 4 Mei 2019, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Sela ... selanjutnya kami langsung masuk ke Petitum, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, saya coba luruskan sebentar, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di TPS 36 itu (...)

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menurut dugaan dari Pemohon, banyak menggunakan surat suara yang seharusnya tidak digunakan?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Betul, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sehingga suara itu menjadi melebihi dari yang menurut Pemohon, begitu, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sek ... sekiranya itu tidak digunakan (...)

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Maka, baik Pemohon maupun Pihak Demokrat, tidak seperti itu besarnya, begitu, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Betul, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, lanjut!

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ke Petitem, Yang Mulia?

108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, langsung Petitem.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Oke. Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Kapuas I pada TPS 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.

Memerintahkan kepada Termohon agar dilaksanakan pemungutan suara ulang pada Daerah Pemilihan I ... izin yang ... Pemilihan I TPS 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sesuai dengan daftar pemilih tetap yang benar setelah dikurangi dengan da ... dengan daftar pemilih tetap yang bermasalah pada TPS tersebut menurut Pemohon.

Empat, menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Daerah Pemilihan I dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 4 atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H.

Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih.

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk Permohonan Petitem nomor 4, ya, ini merupakan kewenangan Mahkamah ini? Ini kewenangan daripada KPU ini.

Baik, ada lagi, Yang Mulia?

Baik, dari pemoh ... Permohonan Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kita anggap selesai. Dari Golkar, ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita beralih ke Permohonan selanjutnya, yaitu dari Partai Demokrat Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, siapa yang mau menyampaikan?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Natalia Sahetapy, izin menyampaikan Permohonan. Untuk halaman 1 sampai 7, dianggap dibacakan, Yang Mulia, boleh? Terima kasih.

Saya akan langsung masuk ke Pokok Permohonan karena sebenarnya ini hanya 1 lembar, boleh dibacakan semua, Yang Mulia?

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu hanya berapa dapil ini?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Hanya untuk di (...)

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya (...)

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Di Kapuasnya, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya 1 ... 1 dapil, ya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, atas nama Bob Tutupoli (...)

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Bob Tutupoli.

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Siap, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi ini coba diperjelas dahulu! Ini internal atau ada partai lain?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ini internal, Yang Mulia (...)

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, internal.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Walaupun di sini ada disebutkan partai lain, tetapi yang data di kami masuk, hanya internal.

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu. Makanya saya agak apa ... jadi Lindawati ini dari mana ini? Partai (...)

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Dari Partai Demokrat juga, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Demokrat juga?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Siap, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, persilakan!

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk DPRD kabupaten/kota, Bob Tutupoli, Kalimantan Tengah, Kapuas, Dapil II, Nomor Urut 5. Bahwa mengenai selisih suara, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa ada dugaan pengurangan suara oleh salah satu caleg Partai Demokrat pada Pleno Mantangai untuk wilayah Desa Sriwidadi, dimana hasil suara tidak sesuai dengan Form C-1 TPS 1 dan TPS 2. Data terlampir, Yang Mulia. Oleh Caleg Demokrat, Dapil Kapuas II, Nomor Urut 4. Oleh sebab itu, berkenan untuk tidak ditetapkan sebagai calon terpilih KPU dan meminta kepada DPD dan DPC memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan pembatalan sebagai Caleg DPRD Kabupaten Dapil Kapuas II.
2. Bahwa Pemohon sebagai Caleg Partai Demokrat, Nomor Urut 5, Dapil II, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sangat dirugikan akibat dikurangnya suara salah satu Caleg Partai Demokrat, TPS 1 dan TPS 2. Di sini juga ada disebutkan nama partai lain, oleh PKB dan PAN.

Berdasarkan seluruh uraian ter ... sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan ... izin langsung masuk Petitum, Yang Mulia. Karena hanya se (...)

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan pembatalan Keputusan komisi ... Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987, dianggap dibacakan yang lain.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Termohon di 2 TPS yang dimaksud, sesuai dengan C-1.

Demikian Permohonan Pemohon, kami haturkan kepada Yang Mulia dan (...)

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Kami haturkan terima kasih. Itu saja, Yang Mulia. Kami (...)

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, dugaan daripada Pemohon, suara itu yang seharusnya kepada Pemohon, malah lari ke caleg lain dari Partai Demokrat, atau ke PKB, atau PAN, begitu, ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, Yang Mulia. Kalau di ... ya, di sini bukti yang dimasukkan cukup banyak (...)

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

He em.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Walaupun hanya ... dalam Permohonan hanya sedikit. Semoga menjadi pertimbangan, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, terlalu singkat nam ... nampaknya ini. Ndak jelas, berapa yang harusnya diperoleh? Berapa yang diduga ke PKB dan PAN, ini? Kebet ... kemudian di Petitem ini (...)

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada masalah ini.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitem nomor 2 itu tolong diulangi dulu, dibaca selengkapnya!

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Izin, Yang Mulia, ya. Memerintahkan kepada Termohon membatalkan keputusan komisi (...)

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini kan ada kata di situ *membatalkan pembatalan*.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Pembatalan (...)

152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, izin, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa itu? Bagaimana itu?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Membatalkan saja, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Membatalkan. Jadi, sah dicoret, ya?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, Yang Mulia. Direnvoi untuk *pembatalan*.

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, supaya tahu juga Pihak Termohon.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), berdasarkan Permohonan kami dan bukti-bukti yang sudah kami masukkan. Terima kasih, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini ex aequo et bono-nya juga ndak ada tercantum.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, cukup dari saya. Ada, Yang Mulia? Cukup. Baik, dari Partai Demokrat kita anggap sudah selesai.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Terima kasih, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita beralih ke Perkara Nomor 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Beringin Karya[Sic!]. Ini yang belum datang, ya? Kita belakangkan dulu. Nanti kalau datang, baru kita panggil lagi. Kemudian dari PAN, siapa yang mau menyampaikan?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Yang Mulia. Bahwa kami adalah Kuasa Hukum dalam Perkara 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yaitu terkait dengan pengisian calon legislatif dari Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Yang menyampaikan ini, namanya siapa?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Pua Hardinata.

170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Puang Hardinata?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Pua. Pua Hardinata.

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ini di kuasa ... di nomor urut berapa ini?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Nomor 1, Pak.

174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nomor 1, ya?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, saya cek dulu. Menandatangani Permohonan, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pua Hardinata? Ya, dipersilakan!

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Adapun Pokok Permohonan yang kami ajukan adalah terkait dengan Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

180. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebelum dilanjut, saya juga mau bertanya. Ini persetujuan dari mana diperoleh ini?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Karena substansi ini terkait dengan adanya suatu kecurangan, sehingga (...)

182. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, yang ditanya saja yang dijawab (...)

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

184. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Persetujuan ini diperoleh (...)

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Dari ... dari (...)

186. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mana?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

DPP, Pak. DPP Partai PAN.

188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dewan ... dewan?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini dibaca dulu dong! Jangan langsung di tan ... dijawab.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak. Terima kasih.

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita sudah baca ini.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, kami mendapat dukungan, Pak, dari Partai Amanat Nasional (...)

194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Melalui Surat Kuasa, Pak. Artinya, tidak berbentuk rekomendasi (...)

196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini singkat saja. Ada persetujuan dari DPP atau tidak?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Dari DPP, persetujuan berupa Surat Kuasa juga, Pak. Karena terkait dengan ... artinya, kecurangan terhadap (...)

198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan itu persoalannya (...)

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Suara partai, Pak.

200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu jangan dulu!

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu kecurangan nanti!

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Substansi itu.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, ya, Pak.

206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang ini prosedur dulu, ya. Karena menurut PMK Nomor 2 Tahun 2018, seluruh itu ... apa namanya ... permohonan yang diajukan oleh perseorangan ... ini kan perseorangan, ya?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perseorangan itu si namanya Pemohon itu, si Jiks ... siapa namanya (...)

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

H. Adie Seth Jinu, Pak.

210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, H. Adie Seth Jinu?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

212. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini kan perseorangan?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

214. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tentu menurut MK Nomor 2 Tahun 2018, itu harus ada persetujuan dari ketua umum dan sekjen daripada partai. Ini saya mau tanya, persetujuan ini dari mana yang ada di sini sekarang? Ini dari DP ... DPD, ya? Ya, jelas di sini.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Jadi, begini, Yang Mulia, bahwa dari DPP Partai Amanat Nasional, kami mohon diizinkan untuk menyerahkan ke hadapan Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada sekarang?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ada.

218. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba kita lihat! Coba diambil!

219. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Surat Kuasa?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

221. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Surat Kuasa dari PAN ke Bapak?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi yang rekomendasi untuk ini ada, enggak?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Karena kami sebagai Kuasa, baik perorangan maupun melalui DPP, Pak, sebagai Kuasa DPP.

225. KETUA: ASWANTO

Sepertinya Bapak ndak mengerti ini.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Jadi (...)

227. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak! Sebentar, Pak! Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 sudah jelas. Yang bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai politik. Perseorangan, kita memungkinkan, tetapi harus ada rekomendasi dari DPP yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Pertanyaannya, Bapak dapat itu ndak dari DPP?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, berbentuk Surat Kuasa ini, Pak.

229. KETUA: ASWANTO

Lain, Pak.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Kalau dari rekomendasi dari ketua mau ... dan sekjen itu (...)

231. KETUA: ASWANTO

Ndak ada?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Tidak ada.

233. KETUA: ASWANTO

Oke. Cukup, Pak.

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon. Apabila diizinkan (...)

235. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, sebentar, ya!

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, Pak, ya. Ini saya bacakan, "Perorangan calon," nah, ini PMK ini ... PMK Nomor 2 Tahun 2018. "Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal." Jadi, persetujuan itu beda dengan kuasa, Pak.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak, ya?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, jadi tadi yang ditanya Yang Mulia Pak Manahan itu, "Sudah dapat persetujuan belum?" Nah, Bapak tetap juga mengatakan, "Surat

Kuasa.” Jadi, ndak relevan, Pak. Lain pertanyaan, lain jawaban. Itu kalau ujian dulu, namanya itu B pilihannya. Tidak ada hubungan antara pernyataan dengan apa ... nah, dikembalikan saja.

Silakan, disampaikan! Nanti biar di apa saja ... direspon saja oleh Termohon.

241. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sebelumnya tadi ada yang mau dikemukakan?

242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Tadi kami izin untuk melihat Surat Kuasa dimaksud itu.

243. KETUA: ASWANTO

Surat kuasa saja, Pak. Bukan rekomendasi, Pak.

244. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan kalau mau dilanjut (...)

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, mohon izin, Pak (...)

246. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi kalau mau dianggap juga, “Ah, kalau memang begitu, saya mundur, tidak menyampaikan lagi.” Boleh juga.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Tapi, sedikit saja. Kami memahami begitu. Kami akan melanjutkan supaya ada (...)

248. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ada sedikit ... sedikit anu ... untuk diketahui, gitu, Pak. Bahwa artinya Pokok Permohonan kami ini ada 3 desa, dimana di desa ini, di Dapil II, Kabupaten Gunung Mas itu, Desa Luwuk Kantor, TPS 01, suara itu 30, tapi dikurang jadi 13, kita pegang C-1. Artinya, suara itu asalnya 30, tapi di pleno kecamatan sisa 15, tapi kita pegang C-1 nya ada di tangan kita. Gitu, Pak

250. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di TPS berapa itu, Pak?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

TPS 01, Pak.

252. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Halaman 5, Permohonan, ya?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

254. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Yang kedua. Di Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing, TPS 02. Sesuai C-1 yang kita pegang, suaranya adalah 6, tapi di pleno kecamatan sisanya 4, hilang 2.

Kemudian, di Desa Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, TPS 07, Kecamatan Manuhing Raya, perolehan suara seharusnya masuk partai=2, tetapi 0, nihil. Kami ada 19 suara yang hilang atau dikurangi.

Oleh karena itu, kami melalui mekanisme dalam satu proses selama tenggat waktu yang ada, menyampaikan keberatan terhadap Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, tetapi tidak ditanggapi atas (...)

256. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada surat keberatannya?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Lengkap, Pak.

258. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengisi form (...)

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ada mengisi form (...)

260. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Form keberatan?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ada.

262. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Kemudian, kita sampaikan tidak ada tindak lanjutnya, sehingga karena tidak ada, kami sampaikan untuk Bawaslu provinsi ... Bawaslu provinsi tanggal 17 Mei mengeluarkan surat bersamaan tanggal 17 Mei juga jawaban dari Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terhadap keberatan kami. Keberatan kami ini adalah sesuai mekanisme melalui Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunung Mas.

Kemudian karena jendela ruang semua tertutup, artinya spekulasi, kami laporkan untuk ke kepolisian. Kami mengetahui itu lewat Gakkumdu. Tetapi karena tidak jalan, tersumbat, maka kami laporkan dengan Polres di Gunung Mas dan dijawab oleh Polres Gunung Mas. Bahwa itu adalah kewenangan dari Bawaslu untuk melalui Gakkumdu.

264. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan ini oleh DPP diketahui ini masalah ini?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Sudah, Pak.

266. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau diketahuikan sebetulnya bagus sekali, ya.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Nah, jadi dalam hal ini, Pak, dari pleno kecamatan dan kemudian keluarlah, artinya hasil daripada perhitungan maupun rekapitulasi bahwa suara dari Pemohon ini hilang 19 atau dikurangi 19 suara, sehingga dia tidak mendapat. Diambang batas (...)

268. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memperoleh kursi, ya?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Memperoleh kursi.

270. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke Petitem, Pak!

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Petitem. Mohon izin dengan Majelis. Bahwa Petitem yang kami sampaikan terkait hanya dengan objek sengketa. Bahwa objek sengketa ini adalah nomor daripada keputusan.

Yang pertama. Mohon izin, kami bacakan. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin nanti kalau diizinkan kami renvoi, Pak (...)

272. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini apalagi Petitem tidak mungkin di renvoi (...)

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Membatalkan ... membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya ... tidak langsung Nomor 135, tetapi Nomor 987 ... 987/PL/01.08/ ... -KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabu ... DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 dan Berita Acara KPU ... Berita Acara KPU Nomor 135/PLK/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 19, 2019 juncto Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 16/PL/01.7-KPT/6210 KPU/ ... -KPS/V/2019 tentang Penetapan Rekap ... Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu, Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 tertanggal 30 April 2019 sepanjang terkait dengan perolehan suara.

Di Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan, yaitu TPS nomor ... TPS 01 suara yang diperoleh sebanyak 15 suara. Seharusnya, sesuai C-1 yang ditandatangani oleh ketua KPPS serta saksi-saksi adalah 30 suara sah. Tetapi pada Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rungan hanya mendapat 15 suara.

274. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut nomor 3!

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Dan Desa Luwuk Tukau, Pak. Begitu juga TPS 02, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas dalam C-1 terdapat perolehan suara calon dari Partai Amanat Nasional adalah 6 suara, tetapi dalam jumlah atau hasil dikurangi ditulis 4 suara.

Di Desa Tehang TPS 07, Kecamatan Manuhing Raya, jumlah perolehan suara dari Partai PAN adalah 2 suara, tetapi dalam jumlah atau hasil perolehan suara dikurangi atau ditulis nihil.

Ketiga, menetapkan agar Termohon untuk melakukan pengembalian perolehan suara Partai Amanat Nasional dan suara calon yang hilang dan/atau kurang berjumlah 19 suara di TPS, seperti yang saya sebutkan tadi di Desa Luwuk Kantor, Desa Luwuk Tukau, di Desa Tehang.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam merekapitulasi perolehan suara untuk Anggota DPRD Gunung Mas di daerah ... di Dapil II sesuai Bukti C-1 yang dimiliki oleh Pemohon yang berpengaruh ambang batas perolehan suara Partai Amanat Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diikutsertakan dalam perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dengan perolehan suara semula 1.051 suara, seharusnya perolehan suara 1.070 suara.

Lima, mewajibkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat, kami Pemohon, Kuasa Pua Hardinata, S.H. Dua, H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H.
Demikian, Pak. Selesai.

276. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Cukup, ya?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Cukup.

278. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

279. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon.

280. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari Termohon ada yang mau disampaikan?

281. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Kami ingin tahu Petitum yang dibacakan itu untuk Permohonan tanggal berapa?

282. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu dia makanya saya lihat di Permohonan yang di sini tertanggal 30 Mei, itu tidak ada.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, seperti yang kami sampaikan (...)

284. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, begini saja ... enggak usah diperdebatkan.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

286. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pedomannya adalah permohonan yang disampaikan kepada Termohon, ya? Cukup. Dari Gerindra Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

288. KETUA: ASWANTO

Sebentar! Sebelum Anda mulai untuk Partai Gerindra. Ini ada 2 Surat Kuasa?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ya.

290. KETUA: ASWANTO

2 Surat Kuasa, sama-sama tanggalnya, tanggal 23, tapi nama penerima kuasa antara Surat Kuasa yang 1 dengan yang lain, itu berbeda. Yang mana yang dipakai ini, Pak?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Yang terakhir, Yang Mulia.

292. KETUA: ASWANTO

Yang mana yang terakhir? Ini sama-sama tanggalnya. Sama-sama tanggal 23 Mei. Yang terakhir yang mana itu? Yang ... yang ada yang Surat Kuasa tanggal 23 Mei juga itu, M. Maulana Bungaran.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ya, Bungaran (...)

294. KETUA: ASWANTO

Itu yang dipakai?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ya.

296. KETUA: ASWANTO

Jadi yang ini ... ini Maulana ini juga, tapi ... ini yang 24 orang yang ... yang tadi saya bacakan itu ada 14 orang, ada juga yang 24 orang, itu gabung dengan di Sumut. Yang mana yang dipakai?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Yang 14 orang itu.

298. KETUA: ASWANTO

Yang 14 orang. Ini, ya?

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Tapi ... tapi kami di sini adalah tambahan juga ada, Yang Mulia.

300. KETUA: ASWANTO

Nah, kalau yang dipakai itu tanggal 23 yang 14 orang, tadi waktu perkenalan Anda menyampaikan nama Dahlan Pido. Di sini ndak adalah Dahlan Pido?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Betul, saya tambahkan di situ nanti.

302. KETUA: ASWANTO

Ada Surat Kuasa tambahan?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Nanti direnvoi di situ sekalian, Yang Mulia.

304. KETUA: ASWANTO

Ndak bisa!

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ada juga nanti di sini ada tambahan yang khusus (...)

306. KETUA: ASWANTO

Kalau ada Surat Kuasa Tambahan, dimasukkan!

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ya. Yang atas nama I Made Arnawa.

308. KETUA: ASWANTO

Ya. Kalau begini saja, Pak (...)

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ya.

310. KETUA: ASWANTO

Supaya singkat. Yang menyampaikan yang ada namanya di Surat Kuasa yang berlaku.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Yang ada yang 1 nanti kita sampaikan dulu (...)

312. KETUA: ASWANTO

Enggak ... enggak nanti, Pak. Yang sekarang.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ya, sekarang ini ada ini.

314. KETUA: ASWANTO

Mana?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ada.

316. KETUA: ASWANTO

Ada namanya Bapak di situ?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Bukan. Yang rekan kami ini.

318. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan yang ... maksud saya yang baca yang (...)

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO

Ya, silakan, silakan. Baik, baik.

320. KETUA: ASWANTO

Ya, ya.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. (...)

322. KETUA: ASWANTO

Yang perbaikannya juga diserahkan, Surat Kuasanya! Berarti tiga kali perbaikan?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Mohon izin, Yang Mulia. (...)

324. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang mau menyampaikan siapa ini namanya?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Saya I Made Arnawa, S.H., Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mariar (...)

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Made Arnawa, S.H. Itu kuasa khusus, tambahan, Yang Mulia.

328. KETUA: ASWANTO

Sudah ada Surat Kuasanya?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Sudah ada, Yang Mulia.

330. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi di sini belum ada namanya ini.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ya, betul, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba diambil surat tambahan itu ... kuasa tambahan itu!

333. KETUA: ASWANTO

Surat Kuasa Tambahan. Ini yang menya ... yang akan menyampaikan I Made Arnawa?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Betul, Yang Mulia.

335. KETUA: ASWANTO

Dari Surat Kuasa Tambahan, ya?

336. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena yang menandatangani Permohonan ini sebenarnya hanya Raka Gani Pissani dan Munatsir Mustaman?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Betul, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang kita pegang ini sekarang. Jadi ini ada kuasa tambahan, ya?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Betul, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namanya tadi (...)

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

I Made Arnawa, S.H.

342. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Marda Arna?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Arnawa, S.H.

344. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Arnawa, ya? Dipersilakan!

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Baik, Yang Mulia. Jadi izin menyampaikan permohonan Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Gerindra pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali, Dapil Bali I. Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Jadi untuk Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (...)

348. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Tenggat Waktu, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian ke Pokok Permohonan. Karena ini juga cuma 1 halaman, Yang Mulia. Bisa saya bacakan secara keseluruhan?

350. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya, cuma halaman 5 dan 6. Silakan!

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ya. Halaman 5 ke Pokok Peromohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut.

Khusus untuk Provinsi Bali, persandingan perolehan suara calon anggota DPRD menurut Pemohon dan Termohon, Caleg Partai Gerindra, Drs. I Wayan Sudiara untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi, Dapil Bali I adalah sebagai berikut.

Nomor Partai 2, nama Partai Gerindra, perolehan suara menurut Termohon adalah 17.522, kemudian menurut kami selaku Pemohon adalah 17.685.

Kemudian perolehan suara Partai Demokrat, Nomor Urut Partai 14. Versi Termohon adalah 17.710, kemudian menurut kami adalah 17.651, vide P-1 sampai dengan P-112.

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa diduga terjadi pengurangan suara Pemohon, hal ini berdasarkan pada DC-1 DPRD provinsi. Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17.522 suara, akan tetapi berdasarkan C-1 DPRD provinsi dan Dokumen DAA-1 DPRD provinsi terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 163 suara.

2. Bahwa diduga terjadi penambahan suara Partai Demokrat, hal ini berdasarkan pada DC-1 DPRD provinsi. Perolehan suaranya adalah sebanyak 17.701 suara, akan tetapi berdasarkan C-1 DPRD provinsi dan Dokumen DAA-1 DPRD provinsi terdapat penambahan suara pada Partai Demokrat sebanyak 59 suara.
3. Bahwa akibat terjadinya dugaan pengurangan suara Pemohon dan sebaliknya terjadinya dugaan penambahan dan/atau ... penambahan saja, Yang Mulia, *pengelembungan*-nya mohon untuk dicoret.

352. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pengelembungan sah dicoret, ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ya, sah dicoret. Dugaan penambahan suara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dirugikan karena tidak mendapatkan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Bali, Dapil I.

4. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan di atas, dan sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai calon yang peroleh kursi untuk pengisian DPRD Provinsi Bali, Dapil I.

354. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Petitem langsung. Petitem.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.B ... sori .8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Daerah Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Bali, Dapil Bali I.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Nomor partai, Nomor Urut 2. Nama partai, Partai Gerindra. Perolehan suara versi Termohon adalah 17.522 (...)

356. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi kalau sudah menurut Pemohon, masa ada lagi menurut Termohon di sini? Ini enggak logis nampaknya, ya. Tapi, silakan. Lanjut!

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Versi Termohon=17.052, kemudian yang ditetapkan Termohon untuk di tetapkan seperti versi kami selaku Pemohon adalah 17.685, Yang Mulia. Kemudian untuk perolehan suara Partai Demokrat, yang tadinya oleh Termohon ditetapkan 17.710, mohon ditetapkan sesuai dengan apa yang kami sampaikan=17.651 sesuai dengan alat-alat bukti yang sudah dan akan kami sampaikan, Yang Mulia. Kemudian.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Dari ... dari Yang Mulia, masih ada? Cukup?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Mohon izin, Yang Mulia, kami juga melakukan penambahan alat bukti, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu nanti, ya (...)

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Oke.

362. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Setelah acara (...)

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Terima kasih, Yang Mulia.

364. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Penyampaian permohonan keseluruhannya nanti selesai. Saya masih menunggu 2 ini, apakah ada yang hadir? Partai Beringin Karya[Sic!]. Tolong dipanggil dulu, Petugas! Tolong dicek. Bagaimana? Tidak hadir, ya. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

365. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan penyampaian awal tadi bahwa untuk partai atau pemohon yang belum hadir, diberi kesempatan sampai selesainya semua yang hadir menyampaikan atau mempresentasikan permohonannya dan ternyata 3 partai yang mempresentasikan sudah selesai semua, tapi ternyata ada 2 perkara ... ada 2 nomor yang sampai sekarang tidak hadir, sehingga Panel menganggap permohonan itu dinyatakan gugur.

Sekarang kita sahkan alat bukti. Yang gugur ndak perlu dijawab, ya, Pak Nurdin, ya. Tadi ada yang mau jawab juga itu yang gugur, nanti jawabannya gugur juga.

366. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Mungkin bila diizinkan, kami menyatakan ada pendahuluan. Karena permohonannya sudah keburu masuk (...)

367. KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

368. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Tapi, kami ada jawaban, tapi tidak kami sampaikan secara lisan. Tapi kami masukkan saja.

369. KETUA: ASWANTO

Ya, baik, ya. Soalnya Pak Hasyim tanya, "Ini yang gugur dijawab, enggak?" Kalau dijawab, ada konsekuensinya, Pak Hasyim. Kalau gugur ada konsekuensinya juga, gitu. Konsekuensinya ke Pak Nurdin, gitu.

Baik, kita saikan alat bukti. Partai Golkar, ini untuk Kalimantan Tengah, ya? Partai Golkar memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-13, betul, ya?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

371. KETUA: ASWANTO

Lengkap sudah (...)

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Kami ada yang ingin dikoreksi di sini, Yang Mulia.

373. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Yang pertama itu Bukti P-3 di nomor 4.

375. KETUA: ASWANTO

He em.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Di nomor 5 itu P-3.1, Yang Mulia.

377. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi nantikan kami harus verifikasi dulu.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Baik.

379. KETUA: ASWANTO

Kita ... kita sahkan yang ada saja dulu.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Termasuk ini, Yang Mulia. Ada 1 tambahan, Yang Mulia.

381. KETUA: ASWANTO

Yang tambahan, silakan diambil Petugas! Kita akan verifikasi dulu.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Cuma 1, Yang Mulia.

383. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang ... yang mengalami perubahan itu P berapa?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

P-3 di nomor 5, jadi P-3.1, Yang Mulia.

385. KETUA: ASWANTO

P-3?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Tit ... ya, yang nomor 5.

387. KETUA: ASWANTO

P-3.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Titik 1.

389. KETUA: ASWANTO

Titik 1?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya.

391. KETUA: ASWANTO

Oke.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terus (...)

393. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Dengan demikian, di ... di mana ... di nomor 2, di halaman 5 untuk (...)

395. KETUA: ASWANTO

Yang penting ... yang ... yang anu ... yang bermasalah saja dulu (...)

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Oh, ya.

397. KETUA: ASWANTO

Yang P-3.1

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Terus di poin 6.

399. KETUA: ASWANTO

P berapa?

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Bukti P-4.

401. KETUA: ASWANTO

P-4.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Selanjutnya itu, selet ... setelah Bukti P-4, Bukti P-4.1 sampai ke bawah P-4.13, Yang Mulia.

403. KETUA: ASWANTO

Oke, itu saja yang ber (...)

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

405. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu bukti Saudara, Bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 kita sahkan, kecuali Bukti P-3.1 dan P-4, ya?

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

P-4 (...)

407. KETUA: ASWANTO

Begitu (...)

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Sampai (...)

409. KETUA: ASWANTO

Itu kan kita belum sahkan, nanti ekor-ekornya juga. Jadi kita sahkan P-1 sampai dengan P-13, kecuali P-3.1 dan P-3.4 karena masih ada ekornya, ya.

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Ya, termasuk yang bukti tambahan tadi, Yang Mulia?

411. KETUA: ASWANTO

Kan kita harus verifikasi dahulu, Pak.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia. Siap.

413. KETUA: ASWANTO

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Partai Demokrat, bukti yang dimasukkan P-1 sampai dengan bukti P-19 (...)

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

P-19, ya.

415. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Ya, siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

417. KETUA: ASWANTO

Lengkap, ya.

KETUK PALU 1X

Partai Amanat Nasional, bukti yang dimasukkan adalah P-1 sampai dengan Bukti P-11. Ini belum dileges, ya. Ada yang belum di leges.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

419. KETUA: ASWANTO

Semuanya belum dileges malah.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

421. KETUA: ASWANTO

He eh. Semuanya belum di leges (...)

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Saya sudah siapkan.

423. KETUA: ASWANTO

Ya?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Sudah siapkan dan kemudian ada (...)

425. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak! Sebentar, ini belum dileges, ya, semua belum dileges, ya? P-6 juga fisiknya tidak ada. Jadi Anda memasukkan P-1 sampai P-14 itu semua belum dileges. Kemudian P-6 malah fisiknya tidak ada, sehingga kita belum bisa sahkan.

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Yang Mulia?

427. KETUA: ASWANTO

Untuk ... untuk PAN, ya, kita belum bisa sahkan. Nanti (...)

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Yang Mulia?

429. KETUA: ASWANTO

Dilengkapi dulu, ya!

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Bisa kami menyerahkan bukti ini yang sudah (...)

431. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Leges, gitu.

433. KETUA: ASWANTO

Silakan, nanti kami verifikasi kembali.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, Pak.

435. KETUA: ASWANTO

Petugas silakan diambil! Kita belum bisa sahkan (...)

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Dan sekalian ada tambahan, gitu, Pak, tambahan (...)

437. KETUA: ASWANTO

Silakan! Ya, jadi PAN belum kita sahkan karena belum dileges dan ada tambahan, kita harus verifikasi dahulu, Pak.

Baik, untuk Bali, Partai Gerindra Bali ini ... Partai Gerindra untuk Bali, memasukkan Bukti P-2.DPRD Prov-1 sampai dengan P-2.DPRD Prov-87. Ada catatan untuk P-2.DPRD Prov-74, P-2 DPR sampai dengan P-2.DPRD Prov-87 ini ada perbedaan antara daftar bukti dengan bukti fisik. Sehingga (...)

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Bisa diulang, Yang Mulia?

439. KETUA: ASWANTO

Oke, ini bukti fisiknya sudah ada, cuma belum sinkron dengan bukti ... dengan alat bukti, ya ... daftar buktinya.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Oke.

441. KETUA: ASWANTO

Nanti bisa disinkronkan, ya!

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ya.

443. KETUA: ASWANTO

Kita sudah bisa sahkan karena bukti fisiknya sudah ini, cuma perlu disinkronkan kembali dengan daftar alat buktinya.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Karena kami juga akan melakukan penambahan alat bukti, sekaligus juga nanti kita akan berikan daftar alat bukti yang baru, Yang Mulia.

445. KETUA: ASWANTO

Kalau begitu kita belum sahkan semua saja dahulu.

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Oke, boleh, Yang Mulia.

447. KETUA: ASWANTO

Ya. Ya, nanti kacau lagi kalau daftar buktinya masuk lagi, ya?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ya, betul.

449. KETUA: ASWANTO

Baik (...)

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Untuk tambahan bisa kami serahkan (...)

451. KETUA: ASWANTO

Silakan, Petugas (...)

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ya.

453. KETUA: ASWANTO

Diambil tambahannya! Itu kopernya juga diserahkan?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Ndak.

455. KETUA: ASWANTO

Ini nanti harus dibuka kalau diserahkan, nanti KPK pikir ada sesuatu yang terselubung di dalamnya. Wah, ini berarti daerah langsung ke sini, ya?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I MADE ARNAWA

Betul, Yang Mulia, biar hemat, Yang Mulia.

457. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi ini bisa menimbulkan kecurigaan bawa koper ke MK, gitu. Baik, terima kasih. Biar kita tidak terlalu tegang, ini penyampaian untuk penundaan sidang.

Diambil dahulu, yang bukti tambahan, ya!

Ini penyampaian untuk penundaan sidang. Sidang berikutnya hari Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2019, waktunya pukul 13.30 WIB. Acara, Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait. Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak akan menyampaikan panggilan tertulis lagi, ya. Saya ulangi. Bahwa pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak akan menyampaikan panggilan tertulis lagi.

Kemudian catatan untuk Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Pihak ... dan Bawaslu. Jawaban Termohon ... jawaban ... perbaikan jawaban Termohon, perbaikan keterangan Pihak Terkait, dan perbaikan keterangan Bawaslu, diajukan ke Mahkamah paling lambat Senin, tanggal 15 Juli tahun 2019, pukul 12.00 WIB, ya. Ini Rabu ... ya. 2 hari sebeleum hari sidang, ya. Kita sidang 17 Juli, 2 hari sebelum berarti 15. Perbaikan jawaban dan perbaikan keterangan harus sudah kami terima. Jelas, ya? Masih ada yang mau berkomentar? Apa lagi?

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Mohon izin, Pak. Kalau diizinkan, begitu, kami sebelum jawaban dari Pihak Termohon, melengkapi rekomendasi dari DPP PAN, begitu, Pak.

459. KETUA: ASWANTO

Silakan saja (...)

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya.

461. KETUA: ASWANTO

Nanti dinilai oleh Mahkamah (...)

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PUA HARDINATA

Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak.

463. KETUA: ASWANTO

Baik. Sidang selesai dan ditutup (...)

464. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Dari Termohon, Yang Mulia.

465. KETUA: ASWANTO

Oh, silakan!

466. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Kami mohon bisa melihat daftar alat bukti dan inzage untuk alat bukti (...)

467. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

468. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21, 222-07-21, 129-12-21, DAN 230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI NURDIN

Dari Pemohon (...)

469. KETUA: ASWANTO

Sesudah ini Saudara bisa melihat ... bisa mengambil malah, bisa mengambil kopian daftar alat bukti dan untuk buktinya bisa inzage, ya.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 12 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.